

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2022

Politeknik Pariwisata Makassar

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Politeknik Pariwisata Makassar adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Politeknik Pariwisata Makassar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Makassar, 31 Desember 2022

Direktur



Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
19630107 199203 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	12
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	15
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	

C.27	Aset Tetap Lainnya	
C.28	Aset Tetap yang Belum Diregister	
C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	25
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	29
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	30
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Politeknik Pariwisata Makassar yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Makassar, 31 Desember 2022

Direktur



Drs. Muhammad Arifin, M.Pd

NIP. 19630107 199203 1 001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Politeknik Pariwisata Makassar Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8,046,435,506 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp8,046,435,506 atau mencapai 101.33 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp7,940,500,000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp175.012.212.230 atau mencapai 96,87 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp180.671.143.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2022 . Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.850.688.502.267 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp8.114.924.016; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.841.974.685.645 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp598.892.606.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.850.688.502.267

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7,499,028,150 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp84,820,012,157 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-77,320,984,007, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp2,372,498,481 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-74,948,485,526.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp1,761,768,197,986, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-74,948,485,526 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -3,096,986,917 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 166,965,776,724 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp1,850,688,502,267

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

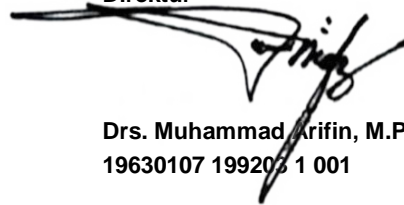
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021**

URAIAN	Catatan	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	7,940,500,000	8,046,435,506	101.33	6,444,075,597
JUMLAH PENDAPATAN		7,940,500,000	8,046,435,506	101.33	6,444,075,597
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	18,105,984,000	17,117,295,806	94.54	15,760,136,381
Belanja Barang	B.2.2	50,054,840,000	46,644,735,702	93.19	49,088,245,053
Belanja Modal	B.2.3	112,510,319,000	111,250,180,722	98.88	100,140,092,472
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		180,671,143,000	175,012,212,230	96.87	164,988,473,906

Makassar, 31 Desember 2022

Direktur



Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
19630107 199203 1 001

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

U R A I A N	Catatan	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	5,732,607,738	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.14	-	-
Persediaan	C.15	2,382,316,278	235,520,291
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		8,114,924,016	235,520,291
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.23	1,360,528,251,000	1,360,528,251,000
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	103,675,327,379	98,465,189,793
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	282,222,020,910	146,971,497,168
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	7,569,054,720	7,394,054,720
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	905,263,823	932,467,273
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	185,337,627,106	226,986,098,123
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(98,262,859,293)	(80,189,285,282)
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
Jumlah Aset Tetap		1,841,974,685,645	1,761,088,272,795
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	1,266,870,450	1,083,520,450
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	2,821,570,781	4,231,318
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	(3,489,548,625)	(643,346,868)
Jumlah Aset Lainnya		598,892,606	444,404,900
JUMLAH ASET		1,850,688,502,267	1,761,768,197,986
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.50	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	1,850,688,502,267	1,761,768,197,986
JUMLAH EKUITAS		1,850,688,502,267	1,761,768,197,986
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1,850,688,502,267	1,761,768,197,986

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	7,499,028,150	6,431,315,597
Jumlah Pendapatan		7,499,028,150	6,431,315,597
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	17,117,295,806	15,760,136,381
Beban Persediaan	D.4	2,202,508,655	3,302,163,746
Beban Barang dan Jasa	D.5	26,703,304,021	30,058,762,867
Beban Pemeliharaan	D.6	3,971,735,172	5,155,083,091
Beban Perjalanan Dinas	D.7	11,841,771,779	10,702,606,036
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	22,983,396,724	18,575,239,289
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		84,820,012,157	83,553,991,410
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(77,320,984,007)	(77,122,675,813)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	414,136,996	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	1,958,361,485	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		2,372,498,481	-
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(74,948,485,526)	(77,122,675,813)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(74,948,485,526)	(77,122,675,813)

Makassar, 31 Desember 2022
Direktur



Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
19630107 199203 1 001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	1,761,768,197,986	1,680,529,264,855
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(74,948,485,526)	(77,122,675,813)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(3,096,986,917)	(182,789,365)
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	(214,497,456)
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	(3,096,986,917)	31,644,291
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	63,800
Jumlah		(3,096,986,917)	(182,789,365)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	166,965,776,724	158,544,398,309
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		88,920,304,281	81,238,933,131
EKUITAS AKHIR	E.6	1,850,688,502,267	1,761,768,197,986

Makassar, 31 Desember 2022
Direktur



Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
19630107 199203 1 001

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

Poltekpar Pariwisata Makassar sebagai salah satu institusi penyelenggara pendidikan di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki peranan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia bidang pariwisata secara khusus di Indonesia Timur dan secara umum di seluruh Indonesia dan dunia internasional. Sejak berdirinya, Poltekpar Makassar melalui suatu Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata telah memiliki komitmen untuk menciptakan tenaga pariwisata yang handal dan profesional yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan pariwisata di Indonesia.

Poltekpar Makassar saat ini telah bertransformasi, dalam pengembangan statusnya mulai dari Balai Pendidikan dan Latihan menjadi Akademi dan akhirnya menjadi Politeknik. Adanya perubahan status ini memberikan tantangan bagi Poltekpar Makassar untuk menyediakan program studi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan harapan industri, pemerintah dan masyarakat. Poltekpar Makassar dimulai dengan pembukaan suatu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dengan nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Gedung Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata di Ujung Pandang (BPLP Ujung Pandang) diresmikan pada tanggal 18 September 1991 oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dengan memanfaatkan gedung yang dipinjamkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara resmi pembukaan BPLP Ujung Pandang ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor: KM.241/OT.001/MPPT-91 tentang Pembentukan Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata di Ujung Pandang tertanggal 10 Oktober 1991. Pada awal berdirinya, BPLP Ujung Pandang menyelenggarakan program Sertifikat Perdana yang meliputi bidang studi Kantor Depan, Tata Graha, Tata Hidangan dan Tata Boga bagi karyawan hotel di kota Ujung Pandang. Pada tahun 1992 BPLP Ujung Pandang mulai membuka dan menerima mahasiswa secara umum untuk program pendidikan Diploma 2 yang meliputi bidang studi Kantor Depan, Tata Graha, Tata Hidangan dan Tata Boga. Oleh karena tuntutan industri pariwisata dalam penyediaan tenaga profesional di bidang perjalanan wisata, maka pada tahun 1993 BPLP Ujung Pandang menambah satu bidang studi yaitu Program Diploma 2 Usaha Perjalanan Wisata.

Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat, maka kebutuhan akan jenjang Pendidikan yang lebih tinggi menjadi prioritas pengembangan institusi sehingga pada tahun 1997 BPLP Ujung Pandang beralih status menjadi Akademi Pariwisata Ujung Pandang berdasarkan Surat Keputusan Nomor KM.27/OT.001/MPPT-97. Sehubungan dengan perubahan status tersebut maka program Pendidikan Diploma 2 dialihkan menjadi Program Pendidikan Diploma 3 yang terdiri dari program studi Manajemen Tata Boga, Manajemen Divisi Kamar, Manajemen Tata Hidangan dan Manajemen Usaha Perjalanan Wisata. Pada tahun 2007 nama Akademi Pariwisata Ujung Pandang berubah menjadi Akademi Pariwisata Makassar dengan menyesuaikan perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar.

Sejak tahun 2007 Akademi Pariwisata Makassar menempati kampus baru yang ada di wilayah Tanjung Bunga dengan luas 16 hektar. Mulai saat itu pembangunan kampus dan penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas dilakukan untuk penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas. Seluruh dana dalam pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berasal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dulunya Kementerian Pariwisata). Dengan demikian Poltekpar Makassar telah memberikan pilihan bagi masyarakat pada jenjang Pendidikan mulai dari Diploma 3 dan Diploma 4 dan saat ini juga Poltekpar Makassar telah mengajukan izin untuk pembukaan program magister terapan bidang pariwisata, sehingga ketersediaan Pendidikan tinggi bidang pariwisata dapat menjawab tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bidang pariwisata yang profesional dan berkualitas sesuai dengan jenjang Pendidikan. Adapun program studi di Poltekpar Makassar saat ini adalah Diploma 3 yaitu Manajemen Bisnis Perjalanan Wisata, Manajemen Divisi Kamar, Manajemen Tata Hidangan dan Manajemen Tata Boga serta Diploma 4 yaitu Manajemen Konvensi dan Perhelatan, Usaha Perjalanan Wisata, Destinasi Pariwisata dan Pengelolaan Perhotelan.

Pada tanggal 29 September 2015, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Arief Yahya memelopori transisi dari Perguruan Tinggi ke Politeknik. Lulusan Politeknik Pariwisata Makassar sudah melahirkan alumni yang bekerja sebagai pegawai negeri (PNS), pegawai bank pemerintah dan swasta, hotel berbintang, pengelola pariwisata dan penerbangan di Indonesia, Malaysia, Singapura, Dubai dan perusahaan pelayaran.

Sebagai Langkah dalam menjaga kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan maka Poltekpar Pariwisata Makassar juga berupaya mendapatkan akreditasi secara internasional dan nasional. Secara internasional, Poltekpar Makassar telah terakreditasi oleh badan pariwisata dunia atau UN-WTO melalui akreditasi Ted-Qual atau Tourism Education Quality.

A.1.1 Visi, Misi dan Tujuan

Untuk mewujudkan dan tercapainya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Poltekpar Makassar disusunlah suatu visi sebagai berikut:

Menjadi Perguruan Tinggi Kepariwisataan Unggulan yang Berbasis pada Kepribadian Indonesia, menuju Daya Saing Internasional pada 2024.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan di atas, maka Politeknik Pariwisata Makassar memiliki misi sebagai berikut:

- a) Menghasilkan SDM kepariwisataan unggulan yang tetap berkepribadian Indonesia;
- b) Mengembangkan penelitian terapan kepariwisataan yang berbasis pada pengetahuan, budaya, dan lingkungan lokal;
- c) Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui inovasi teknologi tepat guna, kearifan lokal, dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, maka Poltekpar Makassar menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang pariwisata yang kompeten dan profesional;
- b) Menyiapkan insan pengabdian pariwisata yang memiliki kemampuan profesional di bidang kepariwisataan, dengan berpedoman pada tujuan pendidikan nasional, kaidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan.
- c) Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai andil dan kontribusi kepada dunia industri dan masyarakat;
- d) Menghasilkan hasil penelitian di bidang kepariwisataan yang memiliki keunggulan kompetitif secara nasional maupun internasional, yang bisa dimanfaatkan oleh dunia industri pariwisata maupun masyarakat.
- e) Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar internasional. Dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar, diharapkan pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
- f) Mewujudkan Kerja Sama Pengembangan SDM Bidang Pariwisata

Pengembangan SDM Pariwisata tidak bisa dilakukan hanya oleh salah satu pihak saja. Prosesnya harus dilakukan secara bersama-sama dalam porsi masing-masing. Atas dasar pemikiran inilah perlu dilakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam bidang pariwisata ini.

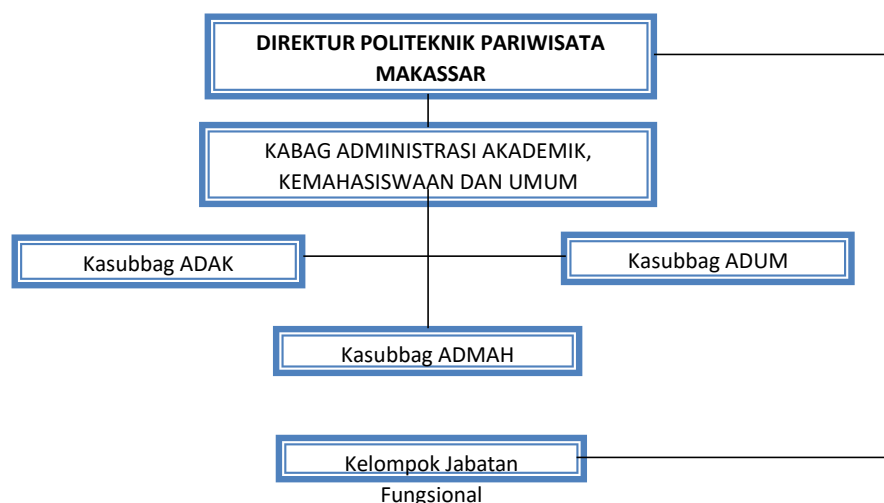
Adapun strategi pencapaian untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas dosen dan tenaga pengajar;
- b) Pelaksanaan evaluasi kurikulum secara berkala sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan industri
- c) Peningkatan kualitas seleksi bagi calon mahasiswa baru;
- d) Peningkatan kualitas pelaksanaan proses belajar mengajar pada level program studi dan institusi sesuai dengan standar yang ada;
- e) Peningkatan kualitas penelitian pengembangan kepariwisataan dan pengabdian kepada masyarakat;
- f) Peningkatan kualitas pelaksanaan sertifikasi kompetensi mahasiswa;
- g) Peningkatan kualitas dan kuantitas kerja sama bidang kepariwisataan;
- h) Peningkatan kualitas dukungan dan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, sarana dan

Tata nilai dan budaya kerja pada Poltekpar Makassar berprinsip pada 3 aspek yaitu sebagai berikut:

- a) Integritas
Civitas Academica Poltekpar Makassar dalam melaksanakan tugasnya selalu bersikap jujur, saling percaya dan bertanggung jawab serta konsisten
- b) Etos Kerja
Civitas Academica Poltekpar Makassar memiliki daya saing, bersikap mandiri, selalu optimis, inovatif, produktif, bekerja sama, solid, dan selalu tolong menolong
- c) Gotong Royong
Selalu mengutamakan kerja sama saling membantu bersifat peka komunal dan berorientasi pada kemaslahatan

A.1.2 Struktur Organisasi



Logo Politeknik Pariwisata Makassar



Adapun rincian arti lambang Poltekar Makassar adalah sebagai berikut:

- a) Bunga teratai berdaun delapan, bunga teratai melambangkan penguasaan ilmu pengetahuan baik di darat, air maupun udara, sedangkan berdaun delapan melambangkan delapan sifat kepemimpinan yang disebut asta brata;
- b) Bintang melambangkan keagungan dan kemuliaan ilmu pengetahuan;
- c) Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan;
- d) Perahu Pinisi melambangkan keteguhan dan semangat dalam menghadapi badai kehidupan;
- e) Badik melambangkan keberanian dalam membela kebenaran;
- f) Untuk Pita bertulis kualleangngangi tallanga na toalia berarti sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai; dan
- g) Lingkaran bertulis Politeknik Pariwisata Makassar melambangkan wadah/ lembaga tempat menuntun ilmu profesional.

A.1.3 Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat materi pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada pelajar. Ada empat faktor penentu dalam perencanaan kurikulum, yaitu faktor filosofis, sosiologis, psikologis dan epistemologis. Diantara faktor-faktor tersebut, faktor sosiologis selalu mengalami perkembangan yang sangat dinamis, sehingga diperlukan evaluasi kursus secara berkala untuk perubahan dan perkembangan tersebut. Namun karena aspek sosiologis ini berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain, selain kurikulum nasional yang terpadu, kurikulum tersebut harus dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah dan potensi masing-masing institusi pendidikan.

Program pendidikan dan pelatihan di Politeknik Pariwisata Makassar menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) berstandar internasional yang telah disepakati pemerintah dan stake holder Pariwisata. Politeknik Pariwisata Makassar bekerja sama dengan PHRI, ASITA, MTTP Ausid (Australia), Joji Ilagan Foundation (Filipina), MNA (Jepang), KOICA (Korea), Bali Recruitment Service (BRS), PT. Magsay Say (Jakarta), ACCOR Hotel (Malaysia) dan lain-lain.

Kurikulum memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting dalam proses pendidikan, kurikulum merupakan syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Melalui kurikulum Politeknik Pariwisata Makassar dapat memberikan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja kepada mahasiswa, sehingga jika mahasiswa lulus mereka akan mudah terserap di dunia kerja yang sesuai kompetensi yang mereka dapat saat di perguruan tinggi. Namun kompetensi-kompetensi yang diajarkan juga harus relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, karena setiap tempat usaha memiliki standar kompetensi yang sudah ditetapkan, sehingga relevansi kompetensi ini sangat penting bagi mahasiswa untuk terserapnya di dunia kerja.

A.1.4 Fasilitas

Untuk melatih mahasiswa yang berkualitas, terdapat sarana dan prasarana laboratorium praktik berstandar internasional, antara lain ruang simulasi perjalanan, sistem tiket online berbasis teknologi, simulasi resepsionis dan housekeeping, sistem operasi hotel berbasis teknologi mikro Fidelio, percobaan praktik laundry. Kamar dan dry cleaning. Dapur Nusantara dan kontinental serta bar makan dan praktik, serta laboratorium bahasa dan ruang belajar mandiri dan poliklinik. Untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler siswa, terdapat fasilitas alat musik (band), lapangan bulu tangkis, bola basket, bola voli, sepak bola, sepak bola dan futsal, serta sarana ibadah. Secara keseluruhan konsep kampus juga terdapat asrama putra dan putri, masing-masing asrama putra dan putri mampu menampung 260 mahasiswa, dan untuk kenyamanan internet juga dilengkapi dengan fasilitas Perustakaan merupakan jantung dari perguruan tinggi karena perpustakaan menyediakan segala macam ilmu dan menjadi pusat pembelajaran, termasuk ilmu perhotelan. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan pengembangan sumber daya manusia di bidang industri pariwisata, Politeknik Pariwisata Makassar pasti memenuhi permintaan akan buku-buku literatur terkait. Koleksi perpustakaan meliputi buku teks, jurnal ilmiah, buku teks, tugas akhir, CD interaktif, dan makalah komprehensif. Koleksi digunakan mahasiswa dan dosen dalam proses penyelesaian dan penyelesaian tugas akhir, laporan, penelitian, penyusunan bahan ajar, dan tugas kuliah / praktikum.

Politeknik Pariwisata Makassar memiliki jaringan internet berbasis kabel (sambungan online) dan jaringan nirkabel (sambungan nirkabel) yang terkonsentrasi pada unit sistem informasi. Jaringan kabel digunakan untuk koneksi Internet dan komunikasi dengan server database, sedangkan jaringan nirkabel digunakan untuk akses eksternal (Internet).

A.1.4 Alumni

Pada bidang pendidikan, keberadaan alumni memegang peranan penting dalam keberlangsungan pembangunan lembaga pendidikan, karena alumni merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan lembaga pendidikan yang mempengaruhi perkembangan lembaga tersebut. Hal ini dilakukan secara tidak langsung oleh masyarakat atau dunia usaha dan industri. Oleh karena itu, alumni perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik oleh lembaga pendidikan. Lembaga perlu menilai kemampuan alumni yang dibutuhkan di dunia kerja agar tidak ada jarak antara dunia pendidikan dengan dunia kerja yang nyata di masyarakat. Salah satu cara untuk mengumpulkan informasi terkait transisi dari universitas ke dunia kerja adalah dengan melakukan studi yang disebut studi lanjutan. Riset pelacakan adalah studi tentang lulusan penyedia pendidikan tinggi.

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Politeknik Pariwisata Makassar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF yang merupakan entitas pelaporan dari Politeknik Pariwisata Makassar. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. **Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2022	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	7,940,500,000	7,940,500,000
Jumlah Pendapatan	7,940,500,000	7,940,500,000
Belanja		
Belanja Pegawai	18,105,984,000	18,105,984,000
Belanja Barang	50,054,840,000	50,054,840,000
Belanja Modal	112,510,319,000	112,510,319,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	180,671,143,000	180,671,143,000

Realisasi
Pendapatan
Rp8,046,435,506

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8,046,435,506 atau mencapai 101.33 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp7,940,500,000. Pendapatan Politeknik Pariwisata Makassar terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp8,046,435,506. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi karena terdapat kenaikan Pendapatan Pendidikan Lainnya dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	7,940,500,000	8,046,435,506	101.33
Jumlah	7,940,500,000	8,046,435,506	101.33

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 24.87 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	8,046,435,506	6,444,075,597	24.87
Jumlah	8,046,435,506	6,444,075,597	24.87

Realisasi
Pendapatan Pajak
Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

Realisasi
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp8,046,435,506

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8,046,435,506 dan Rp6,444,075,597. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 24.87 dari TA 2021. Kenaikan disebabkan adanya pendapatan dari penjualan/lelang peralatan dan mesin yang dilakukan penghapusan, sewa gedung dan bangunan, pendapatan dari biaya wisuda mahasiswa, denda penyelesaian pekerjaan penerimaan kembali belanja modal tahun

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	8,046,435,506	6,444,075,597	24.87
Jumlah	8,046,435,506	6,444,075,597	24.87

Sedangkan Rincian PPNB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PPNB Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	414,136,996	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9,358,000	-	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	219,100,000	152,270,000	43.89
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	308,250,000	265,750,000	15.99
Pendapatan Biaya Pendidikan	5,604,250,000	5,650,200,000	(0.81)
Pendapatan Pendidikan Lainnya	1,244,500,000	312,000,000	298.88
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	113,570,150	50,422,500	125.24
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	147,610	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	133,122,750	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	12,760,000	(100.00)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	673,097	(100.00)
Jumlah	8,046,435,506	6,444,075,597	24.87

B.2 Belanja

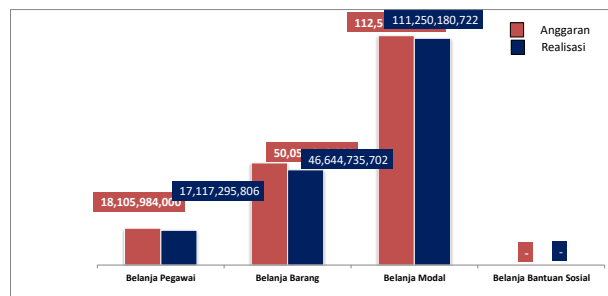
Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp175,012,212,230 atau 96.87 % dari anggaran belanja sebesar Rp.180,671,143,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2022

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	18,105,984,000	17,117,295,806	94.54
Belanja Barang	50,054,840,000	46,644,735,702	93.19
Belanja Modal	112,510,319,000	111,250,180,722	98.88
Jumlah	180,671,143,000	175,012,212,230	96.87

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2022



Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 6.08% Kenaikan terjadi di dominasi dari Belanja Pegawai. Berikut rincian realisasi belanja TA 2022 dan TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Pegawai	17,117,295,806	15,760,136,381	8.61
Belanja Barang	46,644,735,702	49,088,245,053	(4.98)
Belanja Modal	111,250,180,722	100,140,092,472	11.09
Jumlah	175,012,212,230	164,988,473,906	6.08

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp17,117,295,806 dan Rp15,760,136,381. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 8.61 % dari TA 2021. Hal ini disebabkan adanya tambahan pegawai baru dan pegawai pindahan serta penyesuaian kenaikan gaji berkala

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Gaji Pokok PNS	5,479,469,100	5,299,099,400	3.40
Belanja Pembulatan Gaji PNS	80,311	80,156	0.19
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	404,685,830	405,152,150	(0.12)
Belanja Tunj. Anak PNS	136,600,776	132,791,844	2.87
Belanja Tunj. Struktural PNS	40,320,000	40,320,000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	641,758,000	604,563,000	6.15
Belanja Tunj. PPh PNS	29,180,135	26,954,227	8.26
Belanja Tunj. Beras PNS	303,657,060	301,267,200	0.79
Belanja Uang Makan PNS	712,973,000	747,638,150	(4.64)
Belanja Tunjangan Umum PNS	95,940,000	91,675,000	4.65
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	2,084,164,100	2,029,621,400	2.69
Belanja Uang Lembur	93,598,000	121,347,000	(22.87)
Jumlah Belanja kotor	17,119,890,938	15,760,136,850	8.63
Pengembalian Belanja Pegawai	2,595,132	469	553,233.05
Jumlah Belanja	17,117,295,806	15,760,136,381	8.61

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp46,644,735,702 dan Rp49,088,245,053. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami penurunan sebesar 4.98% dari Realisasi TA 2021.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Penurunan belanja barang operasional dan non operasional serta belanja pemeliharaan

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Barang Operasional	5,914,383,791	7,720,923,379	(23.40)
Belanja Barang Non Operasional	11,612,969,072	13,613,349,499	(14.69)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,357,934,968	3,570,502,885	22.05
Belanja Jasa	9,239,602,448	8,820,492,065	4.75
Belanja Pemeliharaan	3,860,210,729	4,758,623,265	(18.88)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	11,846,119,779	10,703,866,036	10.67
Jumlah Belanja Kotor	46,831,220,787	49,187,757,129	(4.79)
Pengembalian Belanja	186,485,085	99,512,076	87.40
Jumlah Belanja	46,644,735,702	49,088,245,053	(4.98)

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp959,233,000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp889,959,203 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2022

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	570,713,000	559,990,503	98.12
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	388,520,000	329,968,700	84.93
Jumlah Belanja	959,233,000	889,959,203	92.78

Realisasi Belanja Modal Rp111,250,180,722

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp111,250,180,722 dan Rp100,140,092,472. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 11,09% dibandingkan TA 2021 disebabkan oleh bertambahnya belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal bangunan gedung.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18,147,126,243	12,719,636,450	42.67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92,632,243,398	86,742,705,572	6.79
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	287,461,081	-	-
Belanja Modal Lainnya	183,350,000	677,750,450	(72.95)
Jumlah Belanja Kotor	111,250,180,722	100,140,092,472	11.09
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	111,250,180,722	100,140,092,472	11.09

Realisasi Belanja Modal Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2022 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp18,147,126,243

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp18,147,126,243 dan Rp12,719,636,450, mengalami kenaikan sebesar 42.67 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan oleh pengadaan peralatan dan mesin .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18,147,126,243	12,719,636,450	42.67
Jumlah Belanja Kotor	18,147,126,243	12,719,636,450	42.67
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	18,147,126,243	12,719,636,450	42.67

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp92,632,243,398

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp92,632,243,398 dan Rp86,742,705,572 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 13.32% dibandingkan Realisasi TA 2021. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Pembangunan gedung kerja berupa hotel dan gedung kuliah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92,632,243,398	81,741,972,872	13.32
Jumlah Belanja Kotor	92,632,243,398	81,741,972,872	13.32
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	92,632,243,398	81,741,972,872	13.32

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp287,461,081

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp287,461,081 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 0.00 % dibandingkan Realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan Adanya pekerjaan Instalasi Air Sumber ,Instalasi Gardu Listrik Induk ,nstalasi Komunikasi Elektronik.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Jaringan	287,461,081	-	-
Jumlah Belanja Kotor	287,461,081	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	287,461,081	-	-

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp183,350,000

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp183,350,000 dan Rp677,750,450, mengalami penurunan sebesar 72.95 % dibandingkan Realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan Penambahan modal lainnya pada tahun ini hanya pekerjaan software/aplikasi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Lainnya	183,350,000	677,750,450	(72.95)
Jumlah Belanja Kotor	183,350,000	677,750,450	(72.95)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	183,350,000	677,750,450	(72.95)

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2022 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2021. Belanja Bantuan

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid)
Rp5,732,607,738

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp5,732,607,738 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Beban Modal Dibayar Dimuka (prepaid)	5,732,607,738.00	-
-	-	-
Jumlah	5,732,607,738	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Beban modal dibayar dimuka terkait bank garansi atas pekerjaan : 1.Pekerjaan pembangunan hotel senilai 3.372.205.092, 2.Pekerjaan konstruksi fisik landscape dan jalan senilai 2.360.402.464.

Uang Muka Belanja
(prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Jenis	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Jenis	TAHUN 2022	TAHUN 2021
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Persediaan Rp2,382,316,278

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2,382,316,278 dan Rp235,520,291. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Jenis	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Barang Konsumsi	2,189,550,456	174,092,111
Bahan untuk Pemeliharaan	150,011,947	10,868,230
Jumlah	2,382,316,278	235,520,291

Persediaan tersebut di atas dalam Nilai persediaan diatas dikarenakan belum dilakukan input keluar

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka pengangan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2022. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
	Jumlah	-	-

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Debitur	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Debitur	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka
Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2022 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih-Piutang Jgk
Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2022 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Properti Investasi Rp0

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2022 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
-	-	-
Jumlah	-	-

**Akumulasi Penyusutan
Properti Investasi Rp0**

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

**Tanah
Rp1,360,528,251,000**

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1,360,528,251,000 dan Rp1,360,528,251,000. Nilai Tanah tersebut Tidak terdapat penambahan atas nilai tanah. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	1,360,528,251,000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2022	1,360,528,251,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2022

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	148,4 M2	Tamalate, Tanjung Bunga Kota Makassar	869,861,440,000
2	86,89 M2	Palangga, Benteng Soba Opu Kab. Gowa	442,954,359,000
3	11,624 M2	Tamalate, Tanjung Bunga Kota Makassar	47,712,452,000
Jumlah			1,360,528,251,000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

**Tanah Belum Diregister
Rp0**

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

**Peralatan dan Mesin
Rp103,675,327,379**

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp103,675,327,379 dan Rp98,465,189,793. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	98,465,189,793
Mutasi tambah:	
Pembelian	3,652,839,600
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	8,209,872,004
Perolehan Lainnya	1,825,091,125
Koreksi Susulan	58,389,375
Transaksi Normalisasi BMN	4,421,714,000
Mutasi Kurang:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	6,196,491,878
Koreksi Pencatatan	424,027,140
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurabng	6,305,194,500
Reklas Keluar ke Persediaan	32,055,000
Saldo per 31 Desember 2022	103,675,327,379
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(71,495,367,229)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	32,179,960,150

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Pembelian alat Kantor, alat rumah tangga, komputer unit dan alat kerja penerbangan
- Penyelesaian pembangunan dengan KDP
- Perolehan lainnya
- Koreksi susulan

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Penghentian dari penggunaan Alat Rumah Tangga, alat kantor dan komputer unit
- Koreksi pencatatan
- Koreksi pencatatan nilai berkurang

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0**

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp282,222,020,910

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp282,222,020,910 dan Rp146,971,497,168. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	146,971,497,168
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	133,686,597,446
Pengembangan Melalui KDP	977,032,833
Koreksi Susulan	586,893,463
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2022	282,222,020,910
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(23,293,502,689)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	258,928,518,221

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Penyelesaian pembangunan dengan KDP
- Pengembangan melalui KDP
- Koreksi susulan

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

-
-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp7,569,054,720

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.7,569,054,720 dan Rp.7,394,054,720. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	7,394,054,720
Mutasi tambah:	
Pembelian	267,027,206
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	92,027,206
Saldo per	7,569,054,720
Akumulasi Penyusutan s.d.	(3,351,696,000)
Nilai Buku per	4,217,358,720

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Penambahan Instalasi Air Sumber, instalasi Gardu Listrik Induk, instalasi komunikasi
-

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- koreksi pencatatan terhadap mutasi jalan irigasi dan jaringan
-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belum Diregister Rp0

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya
Rp905,263,823

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.905,263,823 dan Rp.932,467,273. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	932,467,273
Mutasi tambah:	
Koreksi Perubahan Kondisi	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	27,203,450
Saldo per 31 Desember 2022	905,263,823
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(122,293,375)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	782,970,448

Mutasi tambah/kurang:

Penghapusan Bercorak Kesenian

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp185,337,627,106

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.185,337,627,106 dan Rp.226,986,098,123. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Terdapat peralatan dan mesin dalam pengerjaan, gedung dan bangunan dalam pengerjaan serta jalan dalam pengerjaan Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	226,986,098,123
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	158,239,578,422
Mutasi Kurang:	
Pengembangan KDP	199,888,049,439
Saldo per 31 Desember 2022	185,337,627,106

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp98,262,859,293

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp98,262,859,293 dan Rp80,189,285,282. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2022

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	103,675,327,379	(71,495,367,229)	32,179,960,150
2	Gedung dan Bangunan	282,222,020,910	(23,293,502,689)	258,928,518,221
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7,569,054,720	(3,351,696,000)	4,217,358,720
4	Aset Tetap Lainnya	905,263,823	(122,293,375)	782,970,448
	Akumulasi Penyusutan	394,371,666,832	(98,262,859,293)	296,108,807,539

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Konsesi Jasa Rp0

C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

U R A I A N	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
	-	-
Jumlah	-	-

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2022

No	U r a i a n	Jumlah
-		-
	Jumlah	-

Aset Tak Berwujud Rp1,266,870,450

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp1,266,870,450 dan Rp1,083,520,450. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Politeknik Pariwisata Makassar berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2022	1,083,520,450
Mutasi tambah:	
Pembelian	183,350,000
Mutasi Kurang:	
Saldo Nilai per 31 Desember 2022	1,266,870,450
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	(719,195,550)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	547,674,900

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- Penambahan Aset tak Berwujud
-

Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan Rp0

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Saldo per	-

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya Rp0

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2022	T.A. 2021
Dana Lainnya	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

Dana Cadangan
Perwakilan RI di Luar
Negeri Rp0

C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2022	T.A. 2021
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

Aset Lain-lain
Rp2,821,570,781

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp2,821,570,781 dan Rp4,231,318. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2022	4,231,318
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	6,223,695,328
Mutasi Kurang:	
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah	3,406,355,865
Saldo per 31 Desember 2022	2,821,570,781
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	(2,770,353,075)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	51,217,706

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

- Terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

-

-

Mutasi Kurang

- Penghapusan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan Berupa :
 - Alat Rumah Tangga

-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang
Belum Diregister Rp0

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 3,489,548,625

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp3,489,548,625 dan Rp643,346,868. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	1,266,870,450	(719,195,550)	547,674,900
Aset Lain-lain	2,821,570,781	(2,770,353,075)	51,217,706
Total	4,088,441,231	(3,489,548,625)	598,892,606

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp0

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

dgsdfgdsghdfhdsdfhdsf

Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Rp0

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Pendapatan Diterima
Dimuka Rp0

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2021
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Kewajiban Konsesi
Jasa Rp0

C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Ekuitas
Rp1,850,688,502,267

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1,850,688,502,267. dan Rp1,761,768,197,986. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp7,499,028,150

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp7,499,028,150 dan Rp6,431,315,597. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 16.60. Hal tersebut disebabkan oleh Pendapatan meningkat disebabkan penggunaan asrama dan fasilitas lainnya oleh mahasiswa, adanya pendapatan dari biaya wisuda mahasiswa serta adanya denda penyelesaian pekerjaan. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9,358,000	-	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	219,100,000	152,270,000.00	43.89
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	308,250,000	265,750,000.00	15.99
Pendapatan Biaya Pendidikan	5,604,250,000	5,650,200,000.00	(0.81)
Pendapatan Pendidikan Lainnya	1,244,500,000	312,000,000.00	298.88
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	113,570,150	50,422,500.00	125.24
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	673,097.00	(100.00)
Jumlah	7,499,028,150.00	6,431,315,597.00	16.60

Beban Pegawai
Rp17,117,295,806

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp17,117,295,806 dan Rp15,760,136,381.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar 8.61 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh Kenaikan dikarenakan adanya pegawai baru dan pindahan ,pembayaran kenaikan pangkat dan golongan serta KGB beberapa pegawai. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Gaji Pokok PNS	5,477,759,100	5,299,099,400	3.37
Beban Pembulatan Gaji PNS	79,639	79,687	(0.06)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	404,685,830	405,152,150	(0.12)
Beban Tunj. Anak PNS	136,600,776	132,791,844	2.87
Beban Tunj. Struktural PNS	40,320,000	40,320,000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	641,758,000	604,563,000	6.15
Beban Tunj. PPh PNS	29,180,135	26,954,227	8.26
Beban Tunj. Beras PNS	303,657,060	301,267,200	0.79
Beban Uang Makan PNS	712,973,000	747,638,150	(4.64)
Beban Tunjangan Umum PNS	95,940,000	91,675,000	4.65
Beban Uang Lembur	93,598,000	121,347,000	(22.87)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	7,096,580,166	5,959,627,323	19.08
Beban Tunjangan Profesi Dosen	2,084,164,100	2,029,621,400	2.69
Jumlah	17,117,295,806	15,760,136,381	8.61

Beban Persediaan
Rp2,202,508,655

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2,202,508,655 dan Rp3,302,163,746

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 33.30 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh Penurunan disebabkan menurunnya beban persediaan konsumsi, beban persediaan bahan baku dan beban persediaan lainnya. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Persediaan konsumsi	2,178,401,648	2,973,460,773	(26.74)
Beban Persediaan bahan baku	20,955,050	262,248,617	(92.01)
Beban Persediaan Lainnya	3,151,957	66,454,356	(95.26)
Jumlah Beban Persediaan	2,202,508,655.00	3,302,163,746	(33.30)

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp26,703,304,021 dan Rp30,058,762,867.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 11.16 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh Terjadi penurunan disebabkan penyesuaian untuk belanja kebutuhan perkantoran, penambah daya tahan tubuh serta terjadi penurunan di belanja operasional dan non operasional terkait penanganan pandemi covid setelah memasuki era new normal. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Keperluan Perkantoran	2,839,898,455	3,511,709,142	(19.13)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	177,750,000	180,305,750	(1.42)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,999,860	8,868,320	(77.45)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	557,740,000	487,070,000	14.51
Beban Barang Operasional Lainnya	1,770,192,672	1,778,408,709	(0.46)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	559,990,503	1,656,309,382	(66.19)
Beban Bahan	4,049,653,794	3,660,479,837	10.63
Beban Honor Output Kegiatan	5,160,707,500	5,920,929,000	(12.84)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,899,974,294	2,147,104,027	(11.51)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	329,968,700	1,884,836,635	(82.49)
Beban Langganan Listrik	1,572,809,519	1,079,725,629	45.67
Beban Langganan Telepon	15,284,452	15,290,566	(0.04)
Beban Langganan Air	473,470,980	409,287,320	15.68
Beban Jasa Konsultan	446,450,353	270,252,000	65.20
Beban Sewa	1,763,282,198	2,045,454,579	(13.80)
Beban Jasa Profesi	1,319,623,800	1,550,315,000	(14.88)
Beban Jasa Lainnya	3,646,021,146	3,450,166,971	5.68
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	118,485,795	2,250,000	5,166.04
Jumlah	26,703,304,021	30,058,762,867.00	(11.16)

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3,971,735,172 dan Rp5,155,083,091.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 22.95 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh Terjadi penurunan beban pemeliharaan disebabkan pemeliharaan gedung, peralatan dan mesin sebagian telah dilakukan pemeliharaan di tahun 2021 Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,744,727,900	3,194,665,556	(14.08)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	722,636,292	815,846,877	(11.43)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	392,846,537	748,110,832	(47.49)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	40,685,326	396,459,826	(89.74)
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	70,839,117	-	-
Jumlah	3,971,735,172	5,155,083,091	(22.95)

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11,841,771,779 dan Rp10,702,606,036

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 10.64 persen disebabkan oleh Kenaikan di perjalanan dinas biasa dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Perjalanan Biasa	8,204,475,279	6,315,806,936	29.90
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	68,000,000	59,179,100	14.91
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,307,715,000	1,530,070,000	(14.53)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,261,581,500	2,797,550,000	(19.16)
Jumlah	11,841,771,779	10,702,606,036	10.64

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2021	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp22,983,396,724

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp22,983,396,724 dan Rp18,575,239,289.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	16,235,577,345	14,455,837,770	12.31
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6,197,394,568	3,497,666,332	77.19
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	294,618,667	294,618,667	-
Beban Penyusutan Irigasi	8,621,647	8,621,647	-
Beban Penyusutan Jaringan	162,576,023	145,076,023	12.06
Beban Amortisasi Software	52,205,000	159,481,250	(67.27)
Jumlah Penyusutan	22,950,993,250	18,561,301,689	23.65
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	22,950,993,250	18,561,301,689	23.65

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp414,136,996

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp414,136,996 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	414,136,996	-	-
Jumlah	414,136,996.00	-	-

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp1,958,361,485

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1,958,361,485 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	147,610	-	-
Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	133,122,750	-	-
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	1,825,091,125	-	-
Jumlah	1,958,361,485	-	-

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	559,990,503	1,656,309,382	(66.19)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	329,968,700	1,884,836,635	(82.49)
Jumlah	889,959,203.00	3,541,146,017	(74.87)

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Beban Penanganan Pandemi Covid 19 adalah barang dan bahan perlengkapan protokol new normal

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp.1,761,768,197,986.00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1,761,768,197,986.00 dan Rp.1,680,529,264,855.00

*Defisit LO
Rp.74,948,485,526.00*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.74,948,485,526.00 dan Rp.77,122,675,813.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0.00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.-3,096,986,917 dan Rp.-182,789,365 yaitu sebagai berikut .

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0.00*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan
Rp0.00*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0.00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-214,497,456. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Jumlah	-

*Selisih Revaluasi Aset
Rp.0.00*

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2022

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
Jumlah	-

*Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi Rp-
3,096,986,917*

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.-3,096,986,917 dan Rp.31,644,291. .

Koreksi ini Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk akun 391116

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2022

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(3,096,986,917)
Jumlah	(3,096,986,917.0)

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.63,800. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2022

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.166,965,776,724 dan Rp.158,544,398,309. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	175,012,212,230
Diterima dari Entitas Lain	(8,046,435,506)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	166,965,776,724

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DKEL sebesar Rp 175,012,212,230, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 8,046,435,506

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2022

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2022

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2022 disajikan pada lampiran

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1,850,688,502,267.00 dan Rp.1,761,768,197,986.00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

DAFTAR TABEL

- 1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
- 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 3 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 4 Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 5 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 6 Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2022
- 8 Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 9 Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 10 Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2022
- 11 Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 12 Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 17 Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

DAFTAR GRAFIK

Komposisi anggaran dan realisasi tahun 2022